

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kamboja merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang rawan konflik. Secara geografis, Kamboja diapit oleh negara-negara lain seperti Laos dan Thailand yang berbatasan darat di sebelah utara, Vietnam di sebelah Timur dan Selatan, maupun Teluk Thailand di sebelah barat (Zahriyani, 2017, hlm. 1). Lalu secara internal negara, Kamboja sejak dahulu mengalami konflik-konflik yang disebabkan oleh persaingan kekuasaan di kalangan elit yang ada. Hal ini berdampak pada instabilitas dalam negeri. Selaras dengan pendapat yang diungkapkan oleh Prasanti (2004, hlm. 1 – 2) bahwa sejak dahulu Kamboja sangat sering terjadi atau terlibat berbagai konflik politik, di mana konflik tersebut sangat membahayakan stabilitas keamanan di wilayah atau kawasan pada umumnya.

Pada tahun 1970-an, Kamboja terlibat dalam konflik internal yakni perang saudara dalam pemerintahan yang ditandai dengan perebutan kekuasaan sampai terjadinya kudeta. Seperti yang dikatakan Tully (2005, hlm 71) bahwa konflik internal menimbulkan gejolak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga membuat jatuh bangun pemerintahan dalam negeri Kamboja. Sihanouk menjadi pemimpin Kamboja merdeka pertama setelah diadakan perundingan Jenewa yang mengakhiri perang Indocina serta pemberian status internasional terhadap Kamboja. Sihanouk dalam pemerintahannya mencoba memperkenalkan demokrasi kepada rakyat melalui partai *Sangkum Reastyr Niyum* atau Masyarakat Sosialis Kerakyatan (Devillers, 1998, hlm. 81).

Namun kekuasaan Sihanouk digantikan pada tahun 1970 oleh Perdana Menteri Lon Nol dengan militer Khmer yang dibantu oleh Amerika Serikat (Kasetsiri, 2013, hlm. 3). Lon Nol menggulingkan Sihanouk ketika ia sedang melakukan lawatan ke luar negeri. Kudeta Lon Nol dilakukan dengan dalih keadaan negara yang berada dalam keadaan darurat karena semakin banyak infiltrasi militer Vietnam Utara masuk ke Kamboja (Devillers, 1998, hlm. 119). Dari Beijing, Sihanouk menuntut pembubaran pemerintahan Lon Nol. Dengan dukungan Beijing, Sihanouk pun membangun koalisi dengan *Communist Party Of*

*Kampuchea* (CPK). atau Partai Komunis Kamboja untuk membangun pemerintahan koalisi di pengasingan (Kiernan, 1981, hlm. 161-169). Sikap Lon Nol yang cenderung berkiblat ke Amerika Serikat dan anti-komunis telah menimbulkan perlawanan dari CPK untuk menentang kekuasaan asing di Kamboja. Sikap antipati Sihanouk dan CPK terhadap pemerintahan Lon Nol dan kekuatan asing merupakan salah satu landasan perjuangan yang menyatukan mereka. Oleh sebab itu, Sihanouk pada 5 Mei 1970 mendirikan *Front uni National Du Kampuchea* (FUNK) atau Front Persatuan Nasional Kamboja dan *Gouvernement Royal d'Union National du Kampuchea* (GRUNK) atau Pemerintahan Kerajaan Persatuan Nasional Kamboja yang dipimpin oleh Sihanouk. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yulianty (2009, hlm. 5) bahwa:

Sihanouk dan CPK membentuk Barisan Bersatu Nasional Kampuchea (*Front Uni National du Kampuchea*—FUNK). Melalui FUNK Sihanouk dan Khmer Merah berhasil menarik simpati dan dukungan dalam menentang pemerintahan Lon Nol. Sihanouk juga mengumumkan terbentuknya Pemerintahan Kampuchea Nasional Bersatu (*Gouvernement Royal d'Union Nationale du Kampuchea*—GRUNK) suatu pemerintahan nasional Kamboja untuk menyaingi pemerintahan Lon Nol.

Namun, perbedaan pemikiran di antara mereka menimbulkan masalah dalam tubuh FUNK. Ross (1990, hlm. 122) menegaskan bahwa “Sihanouk yang berpandangan feodalis dan tradisional tidak disukai CPK, yang anti-monarki.” Hal ini membuat CPK bergerak sendiri tanpa melibatkan Sihanouk dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Lon Nol.

Setelah melakukan perlawanan selama lima tahun terhadap pasukan Lon Nol, akhirnya pada 17 April 1975 Phnom Penh berhasil dikuasai oleh CPK. Chandler (1996, hlm.208) mengatakan pemerintahan Lon Nol yang korup dan didukung Amerika Serikat akhirnya berakhir. Pergantian kepemimpinan berakibat kepada berubahnya haluan politik di Kamboja. Seperti yang dijelaskan oleh Chaidar & Sahrasad (2013, hlm. 312) bahwa ketika memerintah tiap penguasa memiliki ciri khasnya masing-masing, baik pada masa pemerintahan Norodom Sihanouk, Lon Nol, maupun Khmer Merah.

Kamboja menjadi sorotan dunia internasional ketika di bawah pemerintahan Khmer Merah (Zahidi, 2016, hlm.67). Khmer Merah memproklamkan Kamboja sebagai negara baru dengan nama *Democratic Kampuchea* (DK) atau Kamboja

Demokratik. Ia menyebutkan tahun 1975 sebagai Tahun Nol, dalam bahasa Khmer disebut *Chhnam Saun*. Seperti yang dikatakan oleh Chaidar & Sahrasad (2013, hlm. 318) bahwa

...beberapa tahun kemudian, Kamboja menghebohkan dunia ketika komunis radikal Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot berkuasa pada tahun 1975, menjatuhkan Lon Nol. Saat itu, Pol Pot memproklamkan Kamboja sebagai sebuah negara baru. Ia menyebut tahun 1975 sebagai “Year Zero,” dimana segala sesuatu-nya ingin dibangun dari titik nol.

Dari pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan awal di benak peneliti mengenai pemerintahan Khmer Merah di Kamboja. Bagaimana keadaan negara Kamboja pada masa pemerintahan Khmer Merah sehingga menjadi sorotan dunia internasional?

Untuk mendapatkan sedikit gambaran yang jelas mengenai pertanyaan awal peneliti tentang pemerintahan Khmer Merah di Kamboja, peneliti berusaha mencari informasi terkait peristiwa tersebut. Dari hasil studi literatur yang dilakukan peneliti terhadap beberapa sumber yang relevan dengan peristiwa tersebut, ditemukanlah fakta-fakta yang cukup menarik bagi peneliti. Beberapa sumber menjelaskan bahwa rezim Khmer Merah yang menjadi pemimpin Kamboja, merubah semua kebijakan yang telah ada sebelumnya. Kebijakan yang menyengsarakan rakyat Kamboja sejak jatuh ke dalam kekuasaan Khmer Merah. Khmer Merah menerapkan gaya kepemimpinan yang sangat otoriter dan militeristik di Kamboja pada waktu itu. Rezim Khmer Merah terkenal sebagai rezim yang brutal dan memusuhi rakyatnya sendiri (Sardiman, 1983, hlm. 67).

Beralihnya Kamboja ke dalam kekuasaan komunis Khmer Merah telah membawa Kamboja pada perubahan yang sangat radikal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (2002, hlm.69) yaitu:

...jatuhnya Pemerintahan Khmer Republik di bawah Lon Nol (1970-1975), yang ditopang oleh Amerika Serikat, dan berkuasanya Pemerintahan *Democratic Kampuchea* di bawah rezim Khmer Merah (1975- 1979) yang didukung oleh China, telah merubah wajah Kamboja. Negara tersebut semula bersifat bebas dan terbuka, dikuasai oleh suatu rezim militer pro Barat, namun kemudian menjelma menjadi suatu negara komunis yang tertutup dan isolatif.

Struktur organisasi pemerintahan Kamboja Demokratik yang dikuasai oleh Khmer Merah tidak lain berisikan kader-kader Khmer Merah. Sistem kolusi

diterapkan dalam menjalankan roda pemerintahan Kamboja (Dy, 2007, hlm. 21). Kamboja masa rezim Khmer Merah dibagi menjadi enam zona geografis: Zona Timur, Zona Utara, Zona Barat, Zona Barat Daya, Zona Barat Laut, dan Zona Timur Laut. Setiap zona tersebut menggabungkan dua atau lebih banyak provinsi tua atau sebagian provinsi lama. Khmer Merah membagi zona yang total berisi 32 wilayah dan memberikan nomor pada tiap zona maupun wilayah di Kamboja. Semua zona administratif tersebut dikuasai oleh pimpinan-pimpinan Khmer Merah. Seperti yang dikatakan oleh Dy (2007, hlm. 23 – 24) bahwa

*...the CPK divided Democratic Kampuchea into six geographical zones. The zones incorporated two or more old provinces or parts of old provinces. The CPK then divided the zones into 32 regions, and gave all the zones and regions numbers. Below the regions were districts, sub-districts, and cooperatives.*

Dalam periode kekuasaannya, rezim Khmer Merah telah banyak menyingkirkan lawan politiknya yang tidak berhaluan komunis maupun yang sama-sama berhaluan komunis sebab dianggap mempunyai perbedaan pandangan dengan petinggi Khmer Merah. Khmer Merah merubah ideologi negara secara radikal tanpa memikirkan kondisi rakyatnya. Ada tiga faktor penyebab tewasnya jutaan penduduk Kamboja, pertama pembunuhan terhadap bekas pendukung Lon Nol, kedua pembersihan partai, dan yang ketiga pembunuhan terhadap orang-orang yang disinyalir tidak mendukung pemerintahan Pol Pot dan Khmer Merah (Kiernan, 1997, hlm. 166). Di samping itu, dalam kenyataannya pemerintahan Khmer Merah telah banyak melakukan tindakan-tindakan yang merenggut hak-hak asasi rakyat Kamboja, seperti hak untuk hidup. Kebijakan rezim Khmer Merah pada masa pemerintahannya membuat rakyat Kamboja menderita.

Salah satu pelaksanaan dalam kebijakan yang diterapkan Khmer Merah dengan mengosongkan kota-kota untuk menghapus kehidupan kota dan membangun Kamboja baru yang berfokus pada swasembada pangan di pedesaan. Rencana empat tahun yang ditujukan untuk mencapai hasil nasional rata-rata tiga ton beras per hektare. Sebuah tugas yang mustahil karena orang Kamboja tidak pernah dipaksa untuk menghasilkan beras sebanyak itu dalam skala nasional sebelumnya. Seperti yang ditegaskan oleh Dy (2007, hlm. 26) bahwa

*...plan aimed at achieving an average national yield of three tons of rice per hectare. This was an impossible task because Cambodians had never been forced to produce that much rice on a national scale before. Moreover, the country had been devastated by war and lacked tools, farm animals and a healthy work force.*

Di samping itu, terdapat pemisahan status sosial seseorang menjadi “orang lama” dan “orang baru”. Langkah ini mengakibatkan banyaknya rakyat Kamboja menderita. Pemerintahan Kamboja Demokratik melakukan hal tersebut untuk tetap melanggengkan kekuasaan dan memaksa penduduk agar tetap tunduk dan patuh. Mereka akan takut karena Khmer Merah tidak akan segan untuk melakukan pembunuhan terhadap mereka yang mengganggu. Reaksi atas kebijakan tersebut pun pada akhirnya bermunculan dari negara di luar Kamboja. Hak-hak asasi yang direnggut oleh rezim Khmer Merah membuka perhatian dunia atas situasi negara Kamboja, hingga pada pengadilan yang dijatuhkan kepada tokoh-tokoh Khmer Merah. Pelaksanaan kebijakan itu membuat Kamboja menjadi sorotan dunia internasional. Bahkan menjadi salah satu kejahatan internasional yang terklasifikasi dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Sejalan dengan pendapat Anderson (2004, hlm. 71) bahwa kasus di Kamboja merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di era modern sejak berakhirnya perang dunia di mana telah merenggut hampir dua juta rakyat selama memerintah dari tahun 1975-1979.

Pada tanggal 3 Desember 1978 dibentuk suatu gerakan pembebasan yang disebut Front Persatuan Nasional Kamboja untuk Keselamatan Nasional atau *Kampuchea National United Front for National Salvation* (KNUFNS). Gerakan KNUFNS tersebut dipimpin oleh Heng Samrin dan didukung oleh pihak Vietnam. Pada tanggal 7 Januari 1979 gerakan KNUFNS berhasil merebut Phnom Penh dan sekaligus dapat menggulingkan rezim Pol Pot. Dengan tergulingnya Pol Pot dari kursi pemerintahan maka tampilah Heng Samrin sebagai penguasa baru di Kamboja (Sardiman, 1983, hlm. 68).

Dari pemaparan peristiwa di atas, muncul kembali rasa penasaran peneliti terhadap beberapa hal yang terbahas. Pertama adalah gambaran umum Kamboja sebelum Khmer Merah berkuasa. Hal ini menjadi penting sebab gambaran umum tersebut memberikan pandangan mengenai situasi Kamboja sebelum Khmer Merah berkuasa, suatu perbandingan yang dapat dilihat nantinya. Kedua,

bagaimana langkah-langkah Khmer Merah dalam melakukan pemerintahan di Kamboja. Bahkan, usaha-usaha yang diterapkan tidak pandang bulu, lawan politik yang berhaluan komunis juga disingkirkan. Lalu, kebijakan seperti apa yang diterapkan oleh Khmer Merah sehingga sebagian besar penduduk di Kamboja menderita, bahkan tidak sedikit meninggal dunia. Serta bagaimana reaksi dalam maupun luar negeri atas dampak yang terjadi terhadap masyarakat Kamboja tersebut?

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan di atas, peneliti menemukan satu permasalahan utama yakni dalam pertanyaan “Bagaimana Upaya dan Reaksi yang Muncul Akibat Kebijakan *Chhnam Saun* Pada Masa Rezim Khmer Merah Terhadap Kehidupan Masyarakat Kamboja (1975-1979)?” Sebab keadaan negara Kamboja pada masa pemerintahan Khmer Merah bukan sekadar masalah biasa dalam hal kekuasaan, melainkan masalah luar biasa dalam kesewenang-wenangan kekuasaan yang tidak hanya menyebabkan rakyat menderita, namun banyak korban jiwa yang berguguran, sebuah genosida yang disebabkan oleh kebijakan brutal pada masa Khmer Merah memimpin Kamboja. Hal tersebut terjadi karena pada saat Khmer Merah berkuasa terjadi semacam revolusi kebudayaan terhadap orang-orang yang dianggap “berbeda” (Munif, 2007, hlm. 154). Anggapan “berbeda” yang menjadi alasan penindasan dan perlakuan berbeda yang dilakukan oleh Khmer Merah. Seperti yang dikatakan oleh So (2011, hlm. 55) yakni adanya penyebutan imigran ilegal kepada etnis Champa saat diinterogasi di Tuol Sleng. Hal tersebut penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan yang diterapkan pada masa Khmer Merah berkuasa di Kamboja.

Penelitian mengenai pemerintahan komunis di Kamboja memang sudah banyak ditulis oleh para peneliti lain. Namun, penelitian khusus mengenai kebijakan yang diterapkan cenderung masih jarang ditemukan. Studi yang sering dikaji ialah mengenai pemerintahan dalam negeri Kamboja. Contohnya studi yang ditulis oleh Puspitasari (2013). Penelitian yang ditulis oleh beliau menitikberatkan pada pemerintahan Kamboja pada masa Pol Pot berkuasa. Lalu, Yulianty (2009) menuliskan fokus serupa yaitu pemerintahan komunis di Kamboja dengan tambahan faktor kejatuhan dari Khmer Merah. Begitupun dengan studi yang dilakukan oleh Prasanti (2004), ia menjelaskan mengenai pemerintahan Pol Pot di

Kamboja, tetapi penelitian yang ia buat memuat tambahan tentang pengaruh Maoisme dan reaksi yang muncul akibat keadaan yang memburuk pada negara Kamboja. Adapun penelitian yang ditulis Allo (2015). Ia berusaha menjelaskan tentang keadaan pemerintahan Kamboja sebelum pemerintahan Pol Pot, proses Pol Pot menjadi Perdana Menteri, keadaan Kamboja dibawah rezim Pol Pot hingga awal pemerintahan Heng Samrin.

Sedikit berbeda dengan sebelumnya, studi yang dilakukan Fawakih (2016) lebih terfokus hanya pada keadaan muslim Kamboja di bawah pemerintahan Khmer Merah dibandingkan keadaan masyarakat Kamboja secara umum. Sedangkan studi yang ditulis oleh Sadino (2016) membahas tentang peran negara luar yang berpengaruh terhadap perkembangan komunisme di Kamboja. Sejalan dengan Sadino, Apriani (2013) menuliskan keterlibatan negara luar yang berimplikasi pada pendudukan Vietnam di Kamboja. Adapun studi mengenai suatu kebijakan yang dilaksanakan pada masa komunis Kamboja berkuasa seperti yang ditulis oleh Setyawan (2007). Namun, beliau memaparkan beberapa kebijakan secara umum dan tidak melihatnya sebagai suatu kebijakan yang saling berhubungan secara khusus. Lalu, studi yang dilakukan Zahriyani (2017) mulai memfokuskan pada suatu kebijakan yang sama dengan peneliti. Bedanya, peneliti menambahkan rumusan penelitian mengenai keadaan Kamboja sebelum Khmer Merah berkuasa, reaksi dunia internasional sebagai dampak kebijakan *chhnam saun*, dan mengelaborasi lebih lanjut gambaran umum pemerintahan Kamboja pada masa Khmer Merah. Serta penelitian yang dikaji oleh peneliti berfokus pada Khmer Merah, bukan hanya terbatas pada Pol Pot. Meski Perdana Menteri saat itu adalah Pol Pot dimulai tahun 1976, namun berjalannya pemerintahan ditunjang oleh anggota Khmer Merah lain yang menjabat. Seperti Khieu Samphan yang menjabat sebagai Presiden atau Kepala Negara dan sempat menjadi Perdana Menteri tahun 1975 hingga 1976, Ieng Sary sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri, Kaing Guek Ev sebagai Ketua Sipir Tuol Sleng, beserta kader-kader lainnya yang memiliki andil menjadi pimpinan zona-zona administratif di Kamboja.

Alasan peneliti memilih tahun 1975-1979 sebagai lingkup pembahasan karena pada tahun tersebut adalah lingkup tahun ketika Khmer Merah menguasai

Kamboja. Dimulai dengan memproklamlirkan nama baru negara tersebut menjadi Kamboja Demokratik atau *Democratic Kampuchea* (DK) pada tahun 1975 setelah menjatuhkan rezim Lon Nol hingga masa pemerintahan Khmer Merah berakhir di Kamboja tahun 1979 saat invasi Vietnam berhasil menumbangkan rezim tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, terdapat satu permasalahan utama yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini, permasalahan tersebut termuat dalam pertanyaan “**Bagaimana Upaya dan Reaksi yang Muncul Akibat Kebijakan *Chhnam Saun* Pada Masa Rezim Khmer Merah Terhadap Kehidupan Masyarakat Kamboja (1975-1979)?**”. Sementara untuk membatasi kajian penelitian agar menjadi lebih fokus, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus sebagai rumusan masalah yang akan dibahas, di antaranya adalah:

1. Bagaimana kondisi Kamboja dalam bidang sosial sebelum pelaksanaan kebijakan *chhnam saun*?
2. Bagaimana gambaran umum pemerintahan Kamboja di bawah rezim Khmer Merah (1975-1979)?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Khmer Merah dalam menjalankan kebijakan *chhnam saun* di Kamboja (1975-1979)?
4. Bagaimana reaksi dalam negeri yang muncul akibat kebijakan *chhnam saun* terhadap masyarakat Kamboja?
5. Bagaimana reaksi dunia internasional yang muncul akibat kebijakan *chhnam saun* terhadap kehidupan masyarakat Kamboja?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi Kamboja dalam bidang sosial sebelum Khmer Merah berkuasa. Dalam hal ini membahas tentang situasi Kamboja pada masa Lon Nol di bidang sosial. Mencakup struktur masyarakat Kamboja yang melingkupi keadaan agama, etnik, dan kultural di bawah pemerintahan Lon Nol pada tahun 1970-1975.

2. Mendeskripsikan gambaran umum pemerintahan Kamboja di bawah rezim Khmer Merah (1975-1979). Dalam hal ini membahas tentang perkembangan Khmer Merah hingga bisa berkuasa di Kamboja, struktur pemerintahan Kamboja di bawah rezim Khmer Merah, dan penjara Tuol Sleng.
3. Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan Khmer Merah dalam menjalankan kebijakan *chhnam saun* di Kamboja (1975-1979). Dalam hal ini membahas tentang langkah-langkah yang diimplementasikan oleh Khmer Merah sebagai usaha mempertahankan eksistensi pemerintahan dan mewujudkan Kamboja yang dibangun dari titik nol atau dalam bahasa Khmer disebut *chhnam saun*.
4. Menganalisis reaksi dalam negeri akibat kebijakan *chhnam saun* terhadap kehidupan masyarakat Kamboja. Dalam hal ini membahas tentang peristiwa yang melibatkan masyarakat dalam negeri Kamboja seperti pemberontakan dan ladang pembantaian (*killing field*) yang diakibatkan oleh pelaksanaan kebijakan *chhnam saun*.
5. Menganalisis reaksi dunia internasional akibat kebijakan *chhnam saun* terhadap kehidupan masyarakat Kamboja. Dalam hal ini membahas tentang reaksi luar negeri seperti invasi dari Vietnam yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Khmer Merah dan munculnya perundingan-perundingan sebagai respons atas konflik internal yang meluas.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai “Kebijakan *Chhnam Saun* Pada Masa Rezim Khmer Merah di Kamboja (1975-1979)”, peneliti berharap dapat memberikan manfaat yang banyak di antaranya:

1. Adanya tulisan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan sejarah, umumnya pada sejarah kawasan Asia Tenggara, khususnya pada perkembangan sejarah Kamboja. Terutama berguna bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menulis tema yang sama, namun dengan judul dan bahasan yang berbeda.
2. Adanya tulisan ini diharapkan dapat memberi pendalaman materi sekaligus sumber rujukan dalam pembelajaran di kelas XII sejarah peminatan, KD 3.6

pada Bab Sejarah Kontemporer Dunia dengan topik mengenai Konflik Asia Tenggara (Kasus Indocina).

3. Adanya tulisan ini diharapkan dapat memperkaya sumber literatur mengenai sejarah Kamboja dan Indocina, serta menjadi bahan rujukan dalam mata kuliah seperti Sejarah Kebangkitan Negara-Negara Asia.

### 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2018, yakni sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang sejarah dan alasan peneliti memilih judul penelitian “Kebijakan *Chhnam Saun* Pada Masa Rezim Khmer Merah Terhadap Kehidupan Masyarakat Kamboja (1975-1979)”. Dalam bab ini juga berisi rumusan masalah penelitian untuk membatasi kajian yang ditulis peneliti, tujuan penelitian yang memaparkan arah rumusan penulisan, manfaat penelitian yang berisi harapan kegunaan penulisan, dan struktur organisasi skripsi sesuai sistematika yang berlaku.

Bab II, Kajian Pustaka. Pada bab ini berisi tentang konsep-konsep dan teori dari sumber literatur yang peneliti anggap relevan. Dalam hal ini teori yang akan digunakan oleh peneliti, buku-buku atau literatur, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti. Semua hal yang tersebut di atas menunjang penulisan skripsi yang dilakukan oleh peneliti.

Bab III, Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan dipakai oleh peneliti. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian sejarah yang diawali dengan pengumpulan sumber, kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah.

Bab IV, Upaya dan Reaksi dari Kebijakan *Chhnam Saun* Pada Masa Rezim Khmer Merah Terhadap Kehidupan Masyarakat Kamboja (1975-1979). Pada bab ini berisi tentang hasil dari penelitian berupa analisis terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan pada bab pertama. Pembahasan terdiri dari kondisi sosial masyarakat Kamboja sebelum munculnya Khmer Merah dalam pemerintahan di Kamboja, gambaran pemerintahan Kamboja di bawah rezim

Khmer Merah, pelaksanaan kebijakan *chhnam saun*, dan kebijakan *chhnam saun* yang mengakibatkan reaksi dalam negeri dan dunia internasional yang berkaitan dengan pemerintahan Khmer Merah tahun 1975 hingga 1979 terhadap kehidupan masyarakat Kamboja.

Bab V, Simpulan dan Rekomendasi. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian yang sudah dipaparkan oleh peneliti. Selain itu, bab ini juga berisi rekomendasi yang dikemukakan oleh peneliti. Hal ini bertujuan agar kelak penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut maupun dikembangkan sesuai perkembangan ilmu dan pengetahuan oleh pihak-pihak yang tertarik dengan topik yang sama.

